

**EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP
(STUDI PADA PAKET PENGOLAHAN DAN PEMASARAN DI KELURAHAN BRONDONG
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN)**

Arina Zahara

Ilmu Administrasi Publik, FISH, Universitas Negeri Surabaya, e-mail: arinazahara@mhs.unesa.ac.id

Weni Rosdiana, S. Sos., M. Ap.

Ilmu Administrasi Publik, FISH, Universitas Negeri Surabaya, e-mail: wena_23979@yahoo.com

Abstrak

Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Evaluasi Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap pada Paket Pengolahan dan Pemasaran di Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Sedangkan tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas produk kelautan dan perikanan, meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan yang adil dan merata, dan mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data purposive sampling dimana subyek penelitian yang dipilih adalah orang yang memahami dan mengetahui terkait program ini. Penelitian deskriptif dipilih untuk menggambarkan apa yang telah terjadi dan menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi dan pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai Evaluasi Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap. Sedangkan fokus dalam penelitian ini adalah efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap pada Paket Pengolahan dan Pemasaran dikatakan cukup efektif dan efisien karena produksi olahan perikanan meningkat dan pinjaman modal yang diberikan tidak mematok bunga, selain itu para pengolah ikan memberikan respon positif baik pada Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran (P2P) maupun bantuan pinjaman modal. Namun pada beberapa kriteria lain seperti kecukupan, pemerataan, dan ketepatan masih terdapat kendala, antara lain terbatasnya bantuan modal dan tidak semua pengolah ikan mengikuti Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran (P2P).

Kata Kunci: Evaluasi, Kawasan Minapolitan

Abstract

Minapolitan is the conception of economic development of region-based marine and fisheries based on the principles of integration, efficiency, quality and speed. This study aimed to describe and analyze the Area Development Program Evaluation Minapolitan Fishing on Packages Processing and Marketing in the Village Brondong Brondong District of Lamongan. While the purpose of this program is to increase production, productivity, and quality of marine and fisheries products, increase the income of fishermen, fish farmers and fish processors are fair and equitable, and develop Minapolitan as a center of regional economic growth

The method used is descriptive qualitative data collection technique purposive sampling where the selected research subjects are people who understand and know the relevant this program. Descriptive study was chosen to describe what has happened and explain why it happened and the qualitative approach used to obtain in-depth information about the Area Development Program Evaluation Minapolitan fisheries. While the focus of this research is the effectiveness, efficiency, adequacy, grading, responsiveness, and accuracy.

The results of this study indicate that the Program Area Development Minapolitan Fishing on Packages Processing and Marketing said to be quite effective and efficient for the production of processed fishery increased and capital loans provided are not charged an interest, other than that the fish processors provide a positive response both in Processing and Marketing Training (P2P) as well as aid a loan , But in some other criteria such as adequacy, alignment, and precision there are problems, such as lack of capital and not all fish processors follow Processing and Marketing Training (P2P).

Key words: Evaluation, Minapolitan Area

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara maritim dengan luas secara keseluruhan 7,9 juta km, dimana 77% dari luas wilayah tersebut merupakan wilayah perairan. Dengan kondisi geografis demikian dapat digambarkan bahwa Indonesia memiliki potensi ekonomi dibidang sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menggali potensi tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Program Pengembangan Kawasan Minapolitan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui revolusi biru yang memiliki empat pilar, yakni perubahan cara berfikir dari daratan ke maritim, pembangunan berkelanjutan, peningkatan produksi kelautan dan perikanan, dan peningkatan pendapatan rakyat yang adil, merata dan pantas.

Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Sedangkan Kawasan Minapolitan adalah suatu wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan kegiatan pendukung lainnya. Program Pengembangan Kawasan Minapolitan dimulai dari pembinaan unit produksi, pengolahan, dan pemasaran yang terkonsentrasi di sentra produksi, pengolahan dan pemasaran di suatu kawasan yang diproyeksikan atau direncanakan menjadi kawasan minapolitan yang dikelola secara terpadu. Sedangkan tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas produk kelautan dan perikanan, meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan yang adil dan merata, dan mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Penggerak utama ekonomi di kawasan minapolitan dapat berupa sentra produksi dan perdagangan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan ikan ataupun kombinasi ketiga hal tersebut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 39 tahun 2011 tentang penetapan Kabupaten Lamongan ditetapkan sebagai salah satu kawasan minapolitan dari 197 Kabupaten/Kota yang ditetapkan. Kabupaten Lamongan ditetapkan sebagai kawasan minapolitan budidaya ikan di Kecamatan Glagah dan minapolitan perikanan tangkap di Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran sebagai hiterlandnya. Dalam minapolitan perikanan tangkap kelompok sasarannya ialah meliputi nelayan dan pengolah ikan. Pada nelayan kegiatan program ini berupa bantuan permodalan dan pelatihan seperti: modifikasi alat

tangkap, pelatihan GPS, dan pelatihan keselamatan pelayaran. Sedangkan untuk pengolah ikan kegiatannya berupa bantuan permodalan dan Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran (P2P). Dalam pelaksanaan program ini dibentuk tim POKJA (Kelompok Kerja) untuk mengelola Program Minapolitan yang terdiri dari penanggung jawab adalah Bupati lamongan, ketua pelaksana adalah Sekretaris Daerah, sekretaris pelaksana adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, bidang perencanaan adalah Kepala Bappeda, bidang pemberdayaan yaitu kepala Pelabuhan, dan anggotanya adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain yang terkait.

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu produsen ikan terbesar di Jawa Timur dengan hasil produksi sebesar 116.972,36 ton pada tahun 2014, dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 yakni 121.915,40 ton, dengan omset mencapai 2 triliun rupiah. Untuk lebih rincinya, dapat dilihat pada pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Data Jumlah Produksi tahun 2014/2015

Data Jumlah Produksi Tahun 2014			Data Jumlah Produksi Tahun 2015		
Jumlah Produksi	Target (Ton)	Capaian (Ton)	Jumlah Produksi	Target (Ton)	Capaian (Ton)
Perikanan Tangkap	67.024,84	74.625,4	Perikanan Tangkap	67.830,56	75.310,5
Perikanan Budidaya	39.853,00	42.346,963	Perikanan Budidaya	41.407,00	46.604,9
Total		116.972,36	Total		121.915,4

Sumber: Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Lamongan

Dari data diatas dapat memperoleh gambaran bahwa adanya kenaikan dari tahun 2014 ke 2015. Hal tersebut ditunjang oleh fasilitas penunjang aktivitas perikanan yang ada di Kelurahan Brondong, seperti: Pelabuhan Perikanan Nusantara, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), KUD Mina Tani, PERINDO (Perikanan Indonesia), dan lain sebagainya.

Adanya Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap diharapkan tidak hanya fokus pada perbaikan fasilitas perikanan dan dapat meningkatkan produksi ikan saja, namun juga fokus pada sektor pengolahan dan pemasaran produk hasil olahan perikanan. Pada usia program yang telah mencapai lima tahun Unit Pengolah Ikan (UPI) mengalami perkembangan yang cukup signifikan yakni sebelum adanya program yakni tahun 2010 terdapat 498 Unit Pengolah Ikan (UPI) dan meningkat pada tahun 2014 sebesar 969 UPI. Meskipun demikian, jenis olahan ini

masih didominasi cara pengolahan secara tradisional, seperti pemindangan, pengasinan atau pengeringan, pengasapan, pendinginan atau es-esan, petis, dan terasi. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai Evaluasi Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap pada Paket Pengolahan dan Pemasaran di Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

KAJIAN TEORI

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dye dalam Widodo (2013) kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi disini pemerintah berhak menjalankan dan tidak menjalankan suatu kebijakan apabila terdapat permasalahan publik. Sedangkan pendapat yang dikemukakan oleh James Anderson dalam Agustino (2008:7) kebijakan publik adalah “Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”.

2. Evaluasi Kebijakan Publik

a. Definisi Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Muhajir dalam Widodo (2013:112) evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat “membuahkan hasil”, yakni dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan. Sedangkan menurut Laster Stewart dalam Agustino (2008:185) “evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

b. Tujuan Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Subarsono (2008:120), evaluasi kebijakan memiliki beberapa tujuan, antara lain:

- 1) Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- 2) Mengukur tingkat efisien suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
- 3) Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah

mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.

- 4) Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditunjukkan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif..
- 5) Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- 6) Sebagai bahan masukan atau input untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

c. Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi memiliki fungsi dalam analisis kebijakan menurut Dunn (2003:609), yaitu: memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target, memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi

d. Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik

1) Efektifitas

Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu kebijakan yang dilaksanakan mencapai hasil yang diharapkan. Efektivitas yang berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya

2) Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat usaha tertentu. Efisiensi yang sinonim dengan rasionalitas ekonomi merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang umumnya diukur dengan biaya moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil disebut efisien.

3) Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas memuaskan

kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan masalah. Kriteria ini menekankan kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang dicapai. Misalnya kebijakan yang memadai adalah kebijakan yang memaksimalkan pencapaian tujuan dengan biaya tetap sama, meminimalkan biaya dalam mencapai tingkat efektivitas yang tetap, biaya berubah efektivitas berubah, biaya sama efektivitas tetap.

4) Perataan

Perataan berkaitan erat dengan rasionalitas legal dan sosial, dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin efektif, efisiensi, dan mencukupi, namun mungkin ditolak karena menghasilkan distribusi biaya dan manfaat yang tidak merata. Hal ini terjadi karena mereka yang membutuhkan tidak menerima pelayanan sesuai dengan jumlah mereka, mereka yang paling tidak mampu membayar dibebani yang tidak proporsional atau mereka yang paling menerima manfaat tidak membayar ongkos.

5) Responsivitas

Responsivitas berkaitan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok masyarakat tertentu. Kriteria ini penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya efektivitas, efisiensi, keukuran, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya satu kebijakan.

6) Ketepatan

Ketepatan berkenaan erat dengan rasionalitas substansif, karena pertanyaan ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu, tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria

ketepatan mempertanyakan apakah tujuan tersebut tepat untuk suatu masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dipilih untuk menggambarkan apa yang telah terjadi dan menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi dan pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai Evaluasi Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap khususnya pada Paket Pengolahan dan Pemasaran.

Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Alasan peneliti melakukan penelitian di Kelurahan Brondong dikarenakan jumlah keluarga tertinggi yang bekerja pada sektor perikanan di wilayah pesisir Kecamatan Brondong adalah di Kelurahan Brondong yakni sebesar 2.208 dengan presentase mencapai 15,54% serta menjadi produsen ikan terbesar se-Jawa Timur. Selain itu, Kelurahan Brondong memiliki fasilitas sebagai penunjang aktivitas perikanan, seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan Pelabuhan Perikanan sehingga fasilitas yang dimiliki cukup memadai untuk menunjang kegiatan perikanan.

Fokus penelitian ini adalah berdasarkan kriteria evaluasi teori mengenai Evaluasi Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap menurut teori yang dikemukakan oleh William Dunn berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan instrumen penelitian berupa kamera dan panduan wawancara. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

Kelurahan Brondong merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dengan luas mencapai 233,64 Ha dan tinggi dari permukaan laut 1,5 md. Topografi bentangan wilayah Kelurahan Brondong adalah tepi pantai atau pesisir yang mencapai luas 10 Ha, aliran sungai 2 Ha, dan bantaran sungai 2 Ha.

dari beberapa sektor seperti pertanian, peternakan, jasa atau perdagangan, sektor perikanan menjadi mata pencaharian penduduk Kelurahan Brondong yang paling tinggi yang mencapai 2.208 orang. Jika diperinci sektor pertanian 271 orang, peternakan 66 orang, sektor jasa/perdagangan baik jasa pemerintahan, jasa perdagangan, jasa ketrampilan berjumlah 1.478 orang, dan di sektor lain berjumlah 1.625 orang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa potensi unggulan yang dimiliki oleh Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan adalah pada sektor perikanan.

2. Gambaran Umum Program

Program Pengembangan Kawasan Minapolitan merupakan salah satu langkah terobosan yang berfokus pada peningkatan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Pelaksana utamanya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang didukung oleh Provinsi Jawa Timur. Sasaran pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Minapolitan, yaitu: meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil, dan meningkatkan jumlah dan kualitas usaha kelautan dan perikanan skala menengah ke atas sehingga berdaya saing tinggi, meningkatkan sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi regional dan nasional. Dalam program minapolitan fokus penelitiannya adalah pada kegiatan Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran (P2P) dan bantuan pinjaman modal.

3. Evaluasi Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap khususnya pada Paket Pengolahan dan Pemasaran di Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

Untuk menilai dan menganalisis apakah program ini telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka peneliti menganalisis dengan teori yang dikemukakan oleh William N. Dunn (2003), seperti berikut ini:

a) Efektivitas

Efektivitas suatu kebijakan atau program diukur dari apakah kebijakan atau program yang dilaksanakan dapat mencapai hasil yang ditetapkan. Pengukuran efektivitas ditinjau dari bagaimana pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran (P2P) dan bantuan pinjaman modal. P2P yang diikuti pengolah ikan yang terdiri dari empat kluster atau tahap yakni peningkatan kehidupan pengolah, pelatihan teknis

operasional, pelatihan manajerial, dan pelatihan promosi belum memberikan manfaat untuk usaha olahan ikan yang mereka miliki. Hal tersebut dikarenakan pengolah ikan Kelurahan Brondong tidak menunjukkan perkembangan variasi olahan perikanan, yakni olahan perikanan tergolong pengolahan secara tradisional.

b) Efisiensi

Dunn (2003:430) mengemukakan bahwa efisiensi berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Pada pelatihan kluster kedua, yakni pada pelatihan teknis operasional pengolah diajarkan bagaimana cara mengelola ikan yang baik dan memenuhi standar kelayakan produksi, namun peneliti menemukan bahwa masih terdapat pengolah yang tidak memenuhi standar kelayakan produksi, seperti kurangnya tingkat kebersihan dalam proses produksi pengolahan. Hal tersebut dilihat dari tempat yang digunakan sebagai proses produksi ikan beberapa pengolah yang ada di Kelurahan Brondong. Namun pada bantuan pinjaman modal dapat dikatakan cukup efisien hal tersebut dikarenakan pinjaman modal yang diberikan tanpa memberikan bunga. Jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lain fasilitas pinjaman yang ditawarkan memiliki bunga yang bisa dikatakan cukup tinggi.

c) Kecukupan

Pada kriteria kecukupan menurut Dunn (2003) berkaitan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan masalah. Dalam hal ini adanya kegiatan Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran (P2P) dan dana bantuan modal yang merupakan solusi yang tepat bagi permasalahan-permasalahan yang umumnya menjadi keluhan para pengolah. Kegiatan Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran (P2P) dan dana bantuan modal dapat dikatakan belum memenuhi kriteria kecukupan. Hal tersebut disebabkan oleh permasalahan yang banyak dikeluhkan oleh pengolah ikan adalah terkait permodalan dan jika melihat mayoritas jenis olahan perikanan di Kelurahan Brondong adalah masih terbatas jenis olahan secara tradisional maka adanya P2P adalah langkah yang solutif untuk lebih mengembangkan hasil olahan perikanan agar lebih kreatif dan inovatif.

d) Perataan

Dalam kriteria ini sangat erat hubungannya dengan konsep keadilan dalam mendistribusikan biaya dan manfaat secara merata pada kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, maka biaya serta manfaat dalam kegiatan Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran (P2P) dapat dikatakan belum merata. Meskipun sosialisasi telah dilakukan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, namun peneliti menemukan bahwa masih ada pengolah ikan yang tidak mengikuti P2P. Terkait bantuan pinjaman modal dapat dikatakan belum memenuhi kriteria perataan. Hal tersebut dikarenakan tidak semua pengolah ikan mendapatkan bantuan pinjaman modal.

e) Responsivitas

Responsivitas berkaitan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok masyarakat tertentu. adanya Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran (P2P) dan bantuan pinjaman modal dapat digambarkan adanya respon positif dari pengolah ikan. Mereka menganggap adanya kegiatan Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran (P2P) merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap para pengolah ikan.

f) Ketepatan

Ketepatan berkaitan erat dengan rasionalitas legal dan sosial, dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Adanya kegiatan Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran (P2P) dapat dikatakan sudah tepat sasaran jika ditinjau dari dampak atau manfaat terhadap pengolah. Hal tersebut ditinjau dari produktivitas pengolah yang meningkat, meskipun pada variasi produk olahan perikanan tidak mengalami peningkatan. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2 Jumlah dan Jenis Pengolah Ikan Kelurahan Brondong Tahun 2010/2014

TAHUN	IKAN SEGAR	IKAN OLAHAN	TOTAL PRODUKSI IKAN
2010	31.796.319 kg	14.636.000 kg	46.432.319 kg

TAHUN	IKAN SEGAR	IKAN OLAHAN	TOTAL PRODUKSI IKAN
	(68,48%)	(31,52%)	
2014	42.388.771 kg (59,18%)	29.237.636 kg (40,82%)	71.626.407 kg

Sumber: Laporan Tahunan 2010 dan 2014 Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Data telah diolah peneliti)

PENUTUP

Kesimpulan

1. Untuk kriteria efektivitas, dapat dikatakan cukup efektif. Hal tersebut dikarenakan dari kurun waktu 2010 sebelum adanya program hingga tahun 2014 produksi olahan perikanan meningkat 9,3% dan bantuan pinjaman modal yang diberikan tidak memberikan bunga.
2. Untuk kriteria efisiensi, dapat dikatakan cukup efisien. Hal tersebut disebabkan selain pinjaman modal yang diberikan tidak memberikan bunga, sistem pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur.
3. Untuk kriteria kecukupan, dapat dikatakan belum cukup. Hal tersebut dikarenakan dana yang diberikan belum bisa memenuhi kebutuhan pengolah ikan dalam mengembangkan usaha olahan perikanan mereka.
4. Untuk kriteria perataan, dapat dikatakan belum merata. Hal tersebut dikarenakan tidak semua pengolah ikan mengikuti P2P. Sedangkan terkait bantuan pinjaman modal tidak diberikan kepada seluruh pengolah ikan.
5. Untuk kriteria responsivitas, program ini mendapatkan respon positif pengolah ikan..
6. Untuk kriteria ketepatan, dapat dikatakan sudah cukup tepat. Hal tersebut dilihat dampak peningkatan produktivitas pengolah ikan.

Saran

1. Memaksimalkan kegiatan Pelatihan Pengolahan Dan Pemasaran sehingga dapat memunculkan pengolah ikan yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga produk olahan perikanan bukan hanya terbatas olahan secara tradisional.
2. Memberikan bantuan permodalan kepada kelompok pengolah yang belum menerima sehingga pengembangan usaha olahan perikanan dapat dilakukan oleh pengolah ikan secara keseluruhan.
3. Bantuan pinjaman modal yang diberikan harus menyesuaikan kebutuhan para pengolah, mengingat setiap pengolah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.

4. Mengoptimalkan kawasan Wisata Bahari Lamongan menjadi sentra produksi, pengolahan, dan pemasaran sehingga dapat menjadi kawasan ekonomi unggulan daerah. Hal tersebut secara tidak langsung dapat mempromosikan potensi perikanan yang dimiliki Kabupaten Lamongan kepada pengunjung lokal maupun luar daerah Kabupaten Lamongan.

DAFTAR PUSTAKA

Afifudin & Saebani, B.A. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta

Dunn, William. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan

Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong tahun 2014

Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Profil Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan tahun 2015

Profil Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan Tahun 2015

Rahman, Ahmad Zaki. 2010. *Optimalisasi Komoditas Perikanan Berbasis Minapolitan sebagai Penggerak Ekonomi Bangsa*.

Soetomo. 2007. *Teori-teori Sosial dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Prenada.

Subarsono. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Sugrto, Hedhi. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Minapolitan di Kabupaten Cilacap*.

Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial..* Bandung: Alfabeta.

Widodo, Joko. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.

Zuriah, Nurul. 2006. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

